

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Syahrizal, 2007, "Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1, Maret.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Hamdan Zoelva, 2016, *Mengawal Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press.

Irvan Mawardi, 2011, *Pemilu dalam Cengkraman Oligarki*, Makasar : Pusat Kajian Politik, Demokrasi, dan Perubahan Sosial.

Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*", Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Laode Ida, 2003, *Basis Pemilihan dan Posisi Tawar DPD*, Jakarta : Kompas.

Mahkamah Konstitusi, 2008, "*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Jakarta : Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Maria Farida Indriati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Jilid 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.

Ni'matul Huda, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

Nur Hidayat Sardini, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta : Fajar Media Press.

Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*,
Bekasi : Gratama Publishing.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung :
Alfabeta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018
Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah.

C. Putusan Hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 64/P/HUM/2018.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

Putusan Bawaslu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00/XII/2018.

Putusan Bawaslu Nomor 036/PS.REG/ BAWASLU/IX/2018.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 21-PKE-DKPP/I/2019.

D.Keputusan.

Keputusan KPU Nomor 1071-PL.01.4-KPT/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar

Calon Pemilih Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
DPD Tahun 2019.

Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar

Calon Pemilih Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
Anggota DPD Tahun 2019.

E.Internet.

Fitria Chusna Farisa, 2019, “Kaleidoskop 2018: Jalan Panjang Polemik
Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD”.
Kompas.com,<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/30/08234331/kaleidoskop-2018-jalan-panjang-polemik-pencalonan-oso-sebagai-anggota-dpd?page=all>.

Muhammad Tommy Kusuma, 2019, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Dari Partai Politik.*

Yulia Windi Agustin, 2019, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan*

*Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai
Pengurus Partai Politik.*

